

Model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres tahun 2019

Noval Prasetyo ^{a*}, Asrinaldi Asrinaldi ^b, Aidinil Zetra ^c

Universitas Andalas. Jl. Situjuh No.1, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, 25129, Indonesia

^a novalprasetyo0@gmail.com; ^b aidinil@soc.unand.ac.id; ^c asrinaldi@soc.unand.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Tingkat partisipasi pemilih dalam memilih masyarakat Sumbar pada Pilpres 2019 mengalami peningkatan, yang diikuti dengan peningkatan skor persepsi korupsi dan kepuasan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi korupsi, kepuasan hidup, dan partisipasi politik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Jumlah responden 1000 orang yang merupakan pemilih dalam Pilpres 2019. Penelitian menemukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Sumbar dinilai sudah cukup baik. Tetapi, temuan ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah dan aparatnya karena hanya berada 6 poin di atas rata-rata. Peringatan juga berlaku bagi calon, parpol yang mengajukan calon, serta sistem dan institusi politik yang ada dalam melaksanakan kehendak rakyat (demokrasi).

Kata Kunci: Persepsi korupsi, kepuasan hidup, partisipasi politik, SEM

How to Cite: Prasetyo, N., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2022). West Sumatran political participation in the 2019 Presidential Election. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 259-268. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.852>



Pendahuluan

Munculnya fenomena penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia patut dikhawatirkan (Surianto, 2018). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang diselenggarakan merupakan bentuk evaluasi dan kontrol terhadap pemimpin atau penyelenggaraan pemerintahan (Liando, 2016). Menurut Almond Verba dan Sidney, partisipasi politik merupakan jantungnya demokrasi. Rendah atau ketiadaan sama sekali partisipasi politik masyarakat adalah permasalahan terhadap praktik berdemokrasi (Febriantanto, 2019).

Pemilu yang digelar dengan keikutsertaan secara penuh oleh masyarakat akan memberikan legitimasi terhadap calon ataupun pasangan calon yang terpilih di dalam pemilu. Hal ini dikarenakan partisipasi politik merupakan ekspresi kebebasan warga negara dalam menggunakan hak politiknya yang terwujud dalam beragam bentuk, seperti: protes, golongan putih, a-politik, *voting* (memilih), maupun berbagai bentuk tindakan lainnya (Kuncoro, 2018). Sampai saat ini kehadiran pemilih dalam pemilu yang cenderung menurun, merupakan indikator utama terhadap partisipasi politik masyarakat seperti yang tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Memilih dalam Pemilu Tahun 2004 - 2014

No.	Tahun	Tingkat Partisipasi dan Jenis Pemilu		Rata-rata Golput
		Pemilu Legislatif	Pemilu Presiden	
1.	2004	84,1%	- putaran pertama 78,2% - putaran kedua 76,6%	18,85%
2.	2009	70,9%	71,7%	28,7%
3.	2014	75,11%	70%	25-30%

Sumber: Diolah dari Panji Surianto, 2020.

Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam tiga kali pemilu yang digelar berdasarkan Tabel 1 telah menurun hingga berada di angka 70%. Situasi ini beriringan dengan muncul dan telah menguatnya kelompok golongan putih (golput). Naik atau turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti: faktor sosial ekonomi (ukuran populasi, stabilitas populasi, perkembangan ekonomi), faktor politik (kedekatan menuju

tempat pemilihan, persepsi terhadap isu politik yang sedang berkembang, pelaksanaan kampanye, perpecahan dalam politik), faktor kelembagaan (sistem pemilu, pemungutan suara wajib, pemilu terkini/terbaru, persyaratan pendaftaran, susunan pemilu), dan faktor individual (umur, pendidikan, kepentingan politik, tanggung jawab kewarganegaraan) (Solijonov, 2016).

Penelitian dan upaya yang dilakukan untuk mengkaji mengapa partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat naik dan turun di berbagai belahan dunia telah banyak dilakukan. Beberapa dari penelitian tersebut antara lain: (Shapiro & Winters, 2008) tentang partisipasi politik dan kepuasan hidup di beberapa negara Amerika Latin, (Inman & Andrews, 2009) korupsi dan partisipasi politik pada beberapa negara demokrasi baru di Afrika, (Flavin & Keane, 2012) kepuasan hidup dan partisipasi politik di Amerika Serikat, (Olsson S. A., 2014) persepsi korupsi dan partisipasi politik di 33 Negara dunia, serta (Zheng, Liu, Huang, & Tan, 2016) tentang kepuasan hidup terhadap persepsi korupsi dan partisipasi politik di China.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang partisipasi yang juga telah dilakukan di Indonesia antara lain: (Wahyudi, et al., 2013) tentang peran kepercayaan dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa di daerah Riau. Selanjutnya penelitian (Fitriah, 2014) tentang *personal values* dan *internal political efficacy* terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula. Serta penelitian (Febriantanto, 2019) tentang faktor dominan yang mempengaruhi tingkat partisipasi kaum penyandang disabilitas dalam Pilkada Yogyakarta Tahun 2017. Namun, penelitian tersebut masih memiliki kekurangan karena belum mampu menjawab apa saja faktor yang mempengaruhi naik serta turunnya tingkat partisipasi masyarakat.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, memiliki perbedaan dari pemilu-pemilu yang telah digelar sebelumnya di Indonesia. Dari segi pelaksanaan, Pemilu 2019 selain dirancang untuk memilih Anggota Legislatif (Pileg) juga dalam rangka untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Dari segi anggaran, Pemilu 2019 mengalami peningkatan sebesar 61% menjadi Rp.25,29 Triliun dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp.15,62 Triliun (CNN Indonesia, 2019). Dari segi hasil, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2019 telah mengalami peningkatan dengan rata-rata 81% (Kompas.com, 2019), dibandingkan pemilu sebelumnya di tahun 2014 yang hanya berada di angka 70% (Kompas.com, 2014).

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Memilih Masyarakat Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah DPT	Tingkat Partisipasi
1	Kabupaten Pesisir Selatan	331.260	81,6%
2.	Kabupaten Solok	281.902	74,5%
3.	Kabupaten Sijunjung	156.595	81,4%
4.	Kabupaten Tanah Datar	276.615	72,7%
5.	Kabupaten Padang Pariaman	313.987	69,5%
6.	Kabupaten Agam	365.029	71,5%
7.	Kabupaten Limapuluh Kota	265.161	81,0%
8.	Kabupaten Pasaman	199.836	81,5%
9.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	63.103	80,5%
10.	Kabupaten Dharmasraya	143.907	89,0%
11.	Kabupaten Solok Selatan	114.161	83,1%
12.	Kabupaten Pasaman Barat	250.723	88,1%
13.	Kota Padang	592.162	80,0%
14.	Kota Solok	47.418	86,4%
15.	Kota Sawahlunto	45.778	85,2%
16.	Kota Padang Panjang	38.781	82,5%
17.	Kota Bukittinggi	81.447	78,0%
18.	Kota Payakumbuh	88.849	84,4%
19.	Kota Pariaman	61.523	84,3%
Total		3.718.237	79,0%

Sumber: Diolah dari KPU Sumatera Barat (2019)

Peningkatan partisipasi masyarakat di dalam Pemilu Presiden (Pilpres) Tahun 2019 juga terjadi di daerah Sumatera Barat. Tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 berada di angka 79% (KPU Sumatera Barat, 2014). Tingkat partisipasi ini telah

meningkat dari Pilpres Tahun 2014 yang hanya di angka 65,19% (KPU Sumatera Barat, 2019). Meningkatnya partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 ini merupakan hal yang menarik. Karena, pihak KPU RI hanya menargetkan angka partisipasi nasional sebesar 77,5% (Kompas.com, 2018). Bahkan sebelumnya pihak Bawaslu RI mewanti-wanti jika Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang rawan dengan partisipasi pemilih (Antara.com, 2019). Peningkatan partisipasi masyarakat Sumatera Barat seperti yang tergambar dalam Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dan sebarannya menurut daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam Pilpres 2019. Menurut laporan *Transparency International* Indonesia sebelum Pilpres Tahun 2019 dilaksanakan telah terjadi peningkatan skor indeks persepsi korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Laporan hasil survey tersebut menyatakan bahwa dari 12 Kota yang disurvei secara proporsional, indeks persepsi korupsi Sumatera Barat yang diwakili Kota Padang telah meningkat dari angka 50,0 pada tahun 2015 berada pada angka 63,1 pada tahun 2017 (Suyatmiko & Ratnaningtyas, 2017). Pertanyaan pertama: Apakah peningkatan skor indeks persepsi korupsi ini memiliki hubungan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat?

Selain peningkatan angka indeks persepsi korupsi di atas, berdasarkan laporan bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, skor indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat juga telah mengalami peningkatan. Mengutip dari laporan tersebut skor indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat telah meningkat dari angka 66,79 pada tahun 2014, menjadi berada pada angka 70,42 pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2019). Sebagai pertanyaan kedua: Apakah peningkatan skor indeks kepuasan hidup ini juga memiliki hubungan dengan meningkatnya angka partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019?

Persepsi Korupsi, Kepuasan Hidup, dan Partisipasi Politik

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata persepsi korupsi dan kepuasan hidup memiliki pengaruh terhadap naik dan turunnya partisipasi politik. Penelitian ini penting secara akademis karena bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara variabel persepsi korupsi, kepuasan hidup, serta partisipasi politik menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM). Metode *Structural Equation Modeling*/Model Persamaan Struktural merupakan suatu pendekatan analisis yang menggabungkan antara analisis faktor (*factor analysis*), model struktural (*structural model*), serta analisis jalur (*path analysis*) (Sugiyono, 2010).

Sementara secara praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih berupa sebuah model partisipasi politik yang terbukti secara empiris melalui proses pengumpulan data di lapangan. Rumusan model partisipasi politik yang dihasilkan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan terutama penyelenggara pemilu, sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab terhadap naik dan turunnya angka partisipasi politik masyarakat pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan. Disamping juga berguna bagi kandidat yang mencalonkan diri, partai politik yang mengusung kandidat, dan juga sistem maupun lembaga politik lainnya dalam mengimplementasikan kehendak rakyat (demokrasi).

Persepsi Korupsi dan Partisipasi Politik

Korupsi secara umum dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Hamdani, Kumalahadi, & Urumsah, 2017). Secara teoritis, disebutkan juga bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial (Pulok & Ahmed, 2017). Korupsi ternyata berdampak negatif terhadap kehidupan politik dengan berkurangnya minat masyarakat terhadap partisipasi politik, kualitas demokrasi jadi terganggu, dan sulit terwujudnya kesetaraan sosial (Judge, McNatt, & Xu, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Inman & Andrews, 2009) menyatakan bahwa, persepsi korupsi memiliki pengaruh yang positif terhadap partisipasi politik. Partisipasi politik dalam penelitian ini dilihat dari tindakan memilih dan protes, dalam rangka menghukum dan melawan praktik korupsi yang terjadi pada Pemerintah dan aparturnya. Temuan ini bersifat kontras

dengan kehidupan masyarakat, disebabkan pada saat yang sama tingkat pendidikan, pendapatan, dan ekonomi masyarakat terbilang rendah.

Penelitian yang serupa juga dilakukan kemudian oleh (Olsson S. A., 2014) yang menyatakan bahwa, persepsi korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap partisipasi politik. Partisipasi politik dalam penelitian ini dilihat dari pemberian suara dalam pemilu, kehadiran pemilih, serta partisipasi yang dilembagakan. Hasil penelitian kemudian mengungkapkan bahwa perilaku korupsi yang dimunculkan oleh Pemerintah dan aparaturannya, telah berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik.

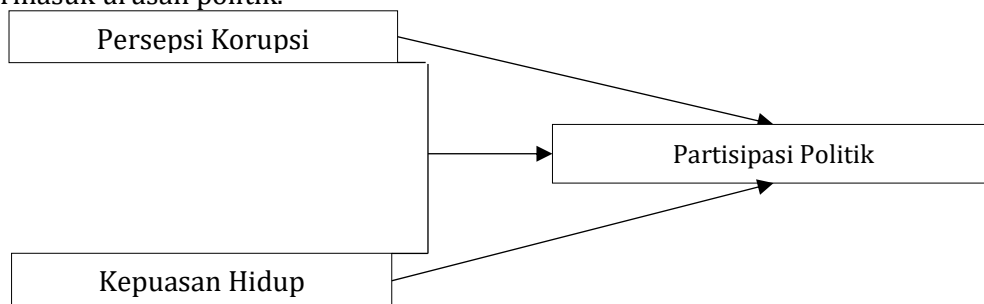
Sikap tidak percaya muncul sebagai pengaruh negatif persepsi korupsi dari masyarakat, terhadap pemerintah dan aparaturannya serta lembaga maupun sistem politik yang ada. Masyarakat menganggap bahwa *output* yang diharapkan dengan partisipasi politik tidak akan tercapai disebabkan korupsi melemahkan efikasi politik internal masyarakat, dan lembaga serta sistem politik yang ada sebagai medium terpilihnya pemerintah dan aparaturannya telah sama korupnya dengan pemerintah dan aparaturannya dalam menjalankan kekuasaan.

Kepuasan Hidup dan Partisipasi Politik

Kepuasan hidup adalah konstruksi psikologis utama yang berfungsi sebagai penilaian subjektif individu dalam dirinya terhadap kondisi kehidupan yang didasarkan pada standar pribadinya (Huebner, Suldo, & Gilman, 2006). Secara teoritis, seseorang yang puas dengan kehidupannya cenderung untuk berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, dan umumnya lebih peduli dengan masalah sosial serta politik dibandingkan mereka yang kurang puas (Veenhoven, 1988).

(Shapiro & Winters, 2008) di dalam penelitian yang mereka lakukan awalnya mengajukan hipotesis bahwa, dengan berpartisipasi individu akan menemukan kebahagiaan sebagai cerminan kepuasan dalam hidupnya. Mereka justru menyatakan kemudian individu yang merasa bahagialah, yang akan cenderung untuk berpartisipasi dalam politik. Fakta lain yang mereka temukan adalah, sekalipun pemilihan umum tersebut diwajibkan oleh pemerintah belum tentu akan dapat meningkatkan kepuasan hidup seseorang.

(Flavin & Keane, 2012) kemudian dengan tegas menyatakan dalam penelitian yang mereka laksanakan bahwa, kepuasan hidup memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik. Menurut mereka, kepuasan hidup selama ini telah diabaikan oleh kebanyakan sarjana dalam penelitian-penelitian berkaitan partisipasi politik. Hasil penelitian mereka mengargumentasikan individu yang cenderung puas dengan kehidupannya, akan berpartisipasi dalam urusan-urusan sosial termasuk urusan politik.



Gambar 1. Model partisipasi politik yang diusulkan

Individu yang memiliki kepuasan dalam hidupnya akan mencoba berpartisipasi untuk kehidupan bersama serta muncul respon positif yang terbentuk di dalam diri. Tercapainya berbagai kebutuhan dan kepentingan pribadi, akan memicu sikap positif untuk terlibat mengupayakan situasi atau kondisi yang serupa untuk orang lain. Hal inilah yang kemudian menuntun individu tersebut mengambil inisiatif melalui jalur-jalur yang dapat mereka usahakan, dan peluangnya terdapat dengan berpartisipasi politik. Oleh sebab itu maka hipotesis yang dibangun dalam tulisan ini adalah:

H1: Persepsi korupsi memiliki hubungan negatif terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

H2: Kepuasan hidup memiliki hubungan positif terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.

Mengacu kepada penjelasan tersebut sehingga rumusan model yang hendak ditawarkan dapat dilihat seperti Gambar 1.

Metode

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei dan desain penelitian eksplanatif. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989). Jumlah responden sebanyak 1000 orang yang berpartisipasi dalam Pilpres Tahun 2019, yang dipilih dengan menggunakan teknik *multistage random sampling*. Data kemudian dianalisis menggunakan *software SEM 22.0*

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan sesuai **Tabel 3**, didapatkan rata-rata skor jawaban responden 2,913 dengan indeks konversi 58,2 dengan kategori “cukup baik”. Kategori ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat yang dianalisis menggunakan variabel persepsi korupsi dan kepuasan hidup harus mendapatkan perhatian. Karena, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat berada di *range* “cukup baik”, dan hanya 6 poin dari ambang batas rata-rata.

Hasil pengukuran yang terdapat pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa dari ketiga variabel untuk memprediksi tingkat partisipasi politik, nilai terendah justru pada variabel partisipasi politik. Tiga instrumen pengukur tingkat partisipasi politik yang digunakan hanya mendapatkan rata-rata skor jawaban responden 1,913 atau dengan indeks konversi 38,26 yang berkategori “rendah”. Hasil pengukuran terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat di dalam Pilpres Tahun 2019 seperti yang tergambar pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019

No.	Variabel dan Pernyataan Instrumen	Rata-rata	Konversi	Keterangan
1.	Tingkat Persepsi Korupsi			
	Menurut saya, dalam banyak kesempatan aparat pemerintah juga terlibat dalam penggelapan uang	3,26	65,2	Ragu-ragu
	Aparat pemerintah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan	3,23	64,6	Ragu-ragu
	Tindakan korupsi aparat pemerintah juga melibatkan pelaku usaha, swasta, dan lain sebagainya	3,76	75,2	Setuju
2.	Tingkat Kepuasan Hidup			
	Kehidupan yang saya jalani sudah sesuai dengan cita-cita	3,26	65,2	Ragu-ragu
	Saya sudah mendapatkan/ memperoleh kondisi hidup yang sangat baik	3,39	67,8	Ragu-ragu
	Sejauh ini saya sudah mendapatkan hal-hal yang penting dalam kehidupan yang dijalani	3,55	71	Setuju
3.	Tingkat Partisipasi Politik			
	Saya ikut mencarikan suara untuk kandidat atau parpol dalam pemilu yang dilaksanakan	1,99	39,8	Tidak setuju
	Saya ikut menganjurkan pembentukan tim sukses pemenangan	1,91	38,2	Tidak setuju
	Saya ikut menjadi pimpinan dalam suatu kelompok/ organisasi politik	1,84	36,8	Tidak setuju
	Rata-rata	2,91	58,2	Cukup baik

Sumber: Diolah dari data primer penelitian, 2021

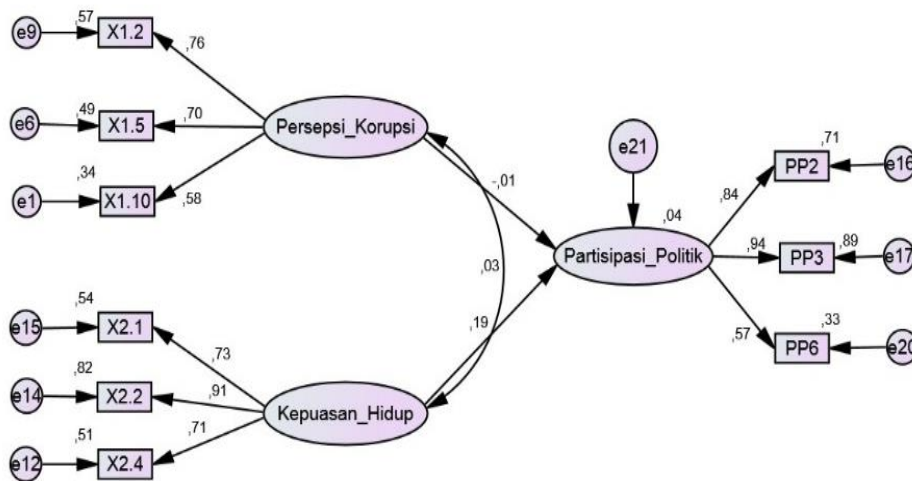
Tabel 3 juga memperlihatkan hasil pengukuran secara deskriptif terhadap dua variabel lainnya yang digunakan, dalam mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat pada

Pilpres Tahun 2019. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel tingkat persepsi korupsi dengan 3 instrumen yang digunakan menunjukkan skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,41 dengan indeks konversi 68,33 yang berpasangan dengan kategori “tinggi”. Sementara variabel tingkat kepuasan hidup dengan 3 instrumen yang digunakan menunjukkan skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,4 dengan indeks konversi 68,0 yang juga berpasangan dengan kategori “tinggi”.

Instrumen dari variabel penelitian yang mendapatkan nilai terendah adalah PP6 dengan pernyataan: “Saya ikut menjadi pimpinan dalam suatu kelompok/organisasi politik”. Instrumen ini hanya mendapatkan rata-rata skor jawaban responden 1,84 dengan indeks konversi 36,8 yang berpasangan dengan kategori “Tidak setuju”. Sementara instrumen yang mendapatkan rata-rata skor jawaban responden tertinggi adalah X1.10 dengan pernyataan “Tindakan korupsi aparat pemerintah juga melibatkan pelaku usaha, swasta, dan lain sebagainya” yang mendapatkan rata-rata skor jawaban responden 3,76 dengan indeks konversi 75,2 yang berpasangan dengan kategori “setuju”.

Rendahnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik dengan jalan menjadi pimpinan dalam kelompok/organisasi politik sesuai instrumen PP6 tersebut, dikarenakan adanya *image* koruptif yang melekat pada institusi partai politik (Oktaryal & Hastuti, 2021). Masyarakat beranggapan bahwa parpol adalah sumber dari segala tindakan korupsi dengan artian jika ikut terlibat menjadi anggota, atau bahkan pimpinan parpol maka berarti ikut terlibat dalam tindakan korupsi yang terjadi. Bahkan muncul anggapan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh parpol, melalui kadernya yang menduduki jabatan di pemerintahan.

Pelaksanaan Pilpres sebagai implementasi demokrasi berimplikasi pada banyaknya pihak yang mencoba untuk melibatkan diri, dalam kapasitasnya bukan sebagai individu warga negara yang memiliki hak pilih. Bentuk kelompok bisnis dan usaha maupun kelompok kepentingan biasa terlibat, sehingga kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi oleh Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011). Sebagai kandidat yang notabene diusung parpol, calon Presiden dan Wakil Presiden yang hendak mengikuti pemilu mesti hendaknya memperhatikan parpol yang akan digunakan dalam mendapatkan dukungan para pemilih. *Output path diagram* (diagram jalur) model yang dihasilkan dengan *software* SEM 22.0 seperti Gambar 2.



Gambar 2. Output Path Diagram Jalur Hasil Analisis SEM (Data primer penelitian olahan SEM, 2021)

Evaluasi model menggunakan *goodness of fit index* (GOFI) atau kriteria kecocokan rumusan model yang diajukan berdasarkan *output path diagram* pada Gambar 2 dan Tabel 4 dinyatakan fit. Hal ini terlihat dari seluruh nilai *loading factor* yang disyaratkan SEM pada Gambar 2 telah terpenuhi. Sebagai teknik analisis data, SEM memungkinkan untuk memberikan saran jika model yang diajukan masih belum memenuhi ketentuan *goodness of fit index* melalui tabel *modification indices*. Nilai indikator yang besar menurut keterangan tabel *modification indices* harus

dieliminasi atau dikorelasikan dengan indikator lain, agar model menjadi fit. Hasil evaluasi model dengan menggunakan *goodness of fit index* (GOFI) seperti yang tergambar dalam Tabel 4.

Tabel 4. Evaluasi Model dengan *Goodness Of Fit Index* (GOFI)

Ukuran GOF	Hasil Uji	Nilai yang diharapkan	Keterangan
Chi-square	31,943	Diharapkan kecil dan ≥ 0	Fit
Probabilitas	0,128	$\geq 0,05$	Fit
RMSEA	0,018	$\leq 0,08$	Fit
TLI	0,996	$\geq 0,90$	Fit

Sumber: Diolah dari data primer penelitian, 2021

Hubungan Persepsi Korupsi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat persepsi korupsi memiliki pengaruh yang negatif, namun tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Hal ini didasarkan pada hasil analisis SEM atas ketiga instrumen tingkat persepsi korupsi yang memiliki nilai estimasi pengaruh jalur $-0,020$ terhadap tingkat partisipasi politik. Nilai estimasi ini bersifat negatif yang berarti bahwa persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik. Sedangkan tidak signifikannya pengaruh persepsi korupsi diketahui dari nilai P (signifikansi) $0,701$ yang lebih besar dari $0,05$ ($\alpha 5\%$).

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (Olsson S. A., 2014) bahwa, persepsi korupsi memiliki pengaruh langsung yang negatif terhadap partisipasi politik. Dugaan bahwa korupsi telah dilakukan pemerintah dan aparaturnya telah melemahkan efikasi dan kepercayaan politik masyarakat, serta munculnya anggapan bahwa lembaga dan sistem politik yang ada sudah tidak bersifat responsif, transparan, dan inklusif terhadap kehendak rakyat juga telah dibuktikan oleh masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 yang dilaksanakan di Sumatera Barat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden petahana, yakni: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akibat persepsi korupsi yang tinggi menyebabkan pasangan ini tidak mendapatkan dukungan dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 terutama "memilih" lebih diarahkan kepada lawan dari Joko Widodo – Ma'ruf Amin, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga S. Uno.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Inman & Andrews, 2009) yang menyatakan situasi sebaliknya di Senegal. Menurut mereka persepsi korupsi memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap partisipasi politik yang dibuktikan dengan meningkatnya keaktifan dari para siswa yang menjadi subjek penelitian untuk memilih dan memprotes. Para siswa tersebut yang mengetahui pemerintah dan aparatnya telah melakukan tindakan korupsi memunculkan kemarahan dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Karena, situasi tersebut hanya akan menciptakan warga negara yang marah, serta tidak percaya kepada pemerintah dan aparaturnya.

Hubungan Kepuasan Hidup terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019

Tingkat kepuasan hidup memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Hal ini didasarkan pada hasil analisis SEM atas ketiga instrumen tingkat kepuasan hidup yang memiliki nilai estimasi pengaruh jalur $0,214$. Nilai estimasi ini bersifat positif dengan artian bahwa kepuasan hidup berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. Pengaruh yang signifikan ditandai dengan nilai P (signifikansi) oleh simbol *** yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$ ($\alpha 5\%$).

Hasil temuan ini sejalan dengan pendapat (Flavin & Keane, 2012) bahwa kepuasan hidup, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Warga negara yang cenderung bahagia karena kepuasan yang diperoleh di dalam menjalani kehidupannya, akan melibatkan diri dalam banyak aktifitas sosial dan kegiatan organisasi dibanding mereka yang tidak puas. Karena penilaian individu terhadap kondisi kehidupan yang sesuai dengan standar pribadinya, akan mengkonstruksi secara psikologis respon perilaku yang positif terhadap berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap tingkat kepuasan hidup yang dilakukan skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,4 dengan indeks konversi 68,0 yang berpasangan dengan kategori “tinggi”. Instrumen kepuasan hidup terkuat adalah X2.24 yang memiliki pernyataan: “Sejauh ini saya sudah mendapatkan hal-hal yang penting dalam kehidupan yang dijalani” mendapatkan skor 72,0. Pernyataan instrumen tersebut menyiratkan bahwa perasaan senang, gembira, atau bahagia masyarakat Sumatera Barat telah berkontribusi positif dalam menjaga penurunan partisipasi politik akibat pengaruh negatif persepsi korupsi.

Emosi pribadi yang positif yang ditandai dengan perasaan riang, gembira, atau bahagia ternyata memang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan politik yang dilakukan seseorang (Healy, Malhotra, & Mo., 2009). Menurut Andrew J. Healy, et al, perasaan senang yang timbul bukan karena aktifitas Pemerintah seperti kemenangan klub olahraga lokal mampu meningkatkan kebahagiaan seseorang. Kecenderungan pemilih untuk memilih kandidat petahana dalam beberapa hari menjelang pemilu yang akan diselenggarakan terdampak oleh perasaan bahagia tersebut, dan secara efektif memberikan keuntungan dengan meningkatnya preferensi pemilih untuk memilih kembali kandidat petahana.

Akan tetapi keuntungan yang disebutkan untuk pihak petahana sebagaimana hasil penelitian Andrew J. Healy, et al tersebut, tidak berlaku dalam konteks Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat. Sebagai buktinya calon Presiden Joko Widodo yang maju kembali dalam Pilpres yang diselenggarakan, dan kemudian berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden tidak mendapatkan dukungan yang memuaskan di Sumatera Barat. Bahkan, perolehan dukungan yang didapatkan kandidat petahana yakni Joko Widodo selaku calon Presiden jauh menurun ketimbang Pilpres yang diselenggarakan pada tahun 2014 yang lalu.

Temuan dalam penelitian ini juga mengkonfirmasi pengaruh positif dan signifikan yang disumbangkan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik, saat dikorelasikan dengan persepsi korupsi yang berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik. Pendapat yang disampaikan Wenwen Zheng, et al (2016) bahwa pengaruh negatif yang dihasilkan persepsi korupsi menjadi tidak signifikan terhadap partisipasi politik, karena berhasil diredam oleh kepuasan hidup yang berpengaruh positif dan signifikan. Menurut mereka kepuasan hidup berperan sebagai penyangga penurunan tingkat partisipasi politik, ketika tingkat persepsi korupsi yang ada terhadap pemerintah dan aparaturnya rendah.

Penjelasan ini menyiratkan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam aktivitas atau proses politik, penting bagi para calon atau kandidat untuk lebih memahami kondisi sosial psikologis masyarakat, yakni: persepsi korupsi dan kepuasan hidupnya. Hal ini dikarenakan persepsi korupsi memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap partisipasi politik, sedangkan kepuasan hidup memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap partisipasi politik. Jika calon pemimpin melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya dengan responsif, transparan, dan inklusif serta dengan kekuasaan tersebut dapat memberikan serta menjaga kepuasan hidup masyarakat mereka maka partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dalam pemilu yang dilaksanakan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka model partisipasi politik yang diusulkan dinyatakan diterima (fit). Persepsi korupsi memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap partisipasi politik, sedangkan kepuasan hidup memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap partisipasi politik. Hal ini mengindikasikan persepsi korupsi sebagai permasalahan sosial, serta kepuasan hidup sebagai penilaian pribadi telah membentuk model partisipasi politik masyarakat khususnya dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.

Hasil penilaian terhadap model tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 secara keseluruhan memperoleh nilai 58,2 dengan kategori “rendah”. Hasil analisis SEM menunjukkan jika persepsi korupsi berpengaruh menurunkan partisipasi politik dengan melemahkan efikasi politik, maka kepuasan hidup mampu menyanggahnya dengan pengaruh positif yang dihasilkan sehingga partisipasi politik tetap memiliki bentuk meskipun dalam tingkat penilaian yang rendah.

Persepsi korupsi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 pada bentuk-bentuk seperti: ikut terlibat menjadi pimpinan organisasi/kelompok politik, ikut menganjurkan pembentukan tim sukses pemenangan, serta ikut mencarikan suara untuk kandidat atau parpol dalam pemilu yang dilaksanakan. Sedangkan kepuasan hidup memberikan pengaruh yang sebaliknya, sehingga partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 seperti ikut serta memilih dalam Pilpres Tahun 2019 yang diselenggarakan tetap diwujudkan.

Kajian ini terbatas dalam membahas hubungan antara variabel persepsi korupsi, kepuasan hidup, dan partisipasi politik sehingga membentuk model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat pada Pilpres Tahun 2019. Penelitian ini belum mampu menjawab mengapa partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 menghasilkan penilaian yang rendah, meski partisipasi memilih mengalami peningkatan dari Pilpres sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mencerminkan pandangan, dan nilai-nilai lokal yang hidup serta berkembang di Sumatera Barat.

Penilaian terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dengan perolehan nilai 58,2 serta dikategorikan “rendah” hendaknya menjadi peringatan bagi pemerintah dan aparaturnya. Hasil penilaian ini perlu mendapatkan perhatian oleh banyak pihak karena hanya 6 poin di atas rata-rata. Peringatan ini juga berlaku bagi setiap kandidat yang mencalonkan diri, partai politik yang mengusulkan para kandidat, maupun sistem dan lembaga politik yang ada dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat (demokratis). Karena dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat adalah inti (jantung) nya demokrasi.

Daftar Pustaka

- Antara.com. (2019, April 9). *Bawaslu: Ada 16 provinsi rawan pada Pemilu 2019*. Diambil kembali dari Antara.com: <https://www.antarane.ws.com/berita/822601/bawaslu-ada-16-provinsi-rawan-pada-pemilu-2019>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat: Edisi November 2019*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- CNN Indonesia. (2019, Maret 27). *Anggaran Pemilu Naik 61 Persen Jadi Rp25 Triliun*. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran-pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran-pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun)
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *PolGov, Vol. 1(1)*, 157-190.
- Fitriah, E. A. (2014). Personal Values dan Internal Political Efficacy Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula. *Psychathic, Vol. 1(2)*, 244-254.
- Flavin, P., & Keane, M. J. (2012). Life Satisfaction and Political Participation: Evidence from the United States. *Happiness Studies, (13)*, 63-78.
- Haluan.com. (2019, Mei 13). *Partisipasi Pemilih Sumbar Meningkat di Pemilu 2019, Begini Kata Pengamat*. Diambil kembali dari haluan.com: <https://www.harianhaluan.com/politik/pr-10210258/partisipasi-pemilih-sumbar-meningkat-di-pemilu-2019-begini-kata-pengamat?page=all>
- Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. *SHS Web Conferences 34*, 1-9.
- Healy, A. J., Malhotra, N., & Mo., C. H. (2009). *Personal Emotions and Political Decision Making: Implications for Voter Competence*. California: Graduate School of Business.
- Huebner, E. S., Suldo, S. M., & Gilman, R. (2006). *Life Satisfaction*. Maryland: National Association of School Psychologists.

- Inman, K., & Andrews, J. T. (2009). *Corruption and Political Participation in Africa: Evidence from Survei and Experimental Research*. Chicago: Midwest Political Science Association.
- Judge, W. Q., McNatt, D. B., & Xu, W. (2011). The antecedents and effects of national corruption: A meta-analysis. *Journal of World Business*, 93-1003.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bagian Hukum Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kompas.com. (2014, Juli 23). *Ternyata Tingkat Partisipasi dalam Pilpres Menurun Dibandingkan Pileg*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/16270771/Ternyata.Tingkat.Partisipasi.dalam.Pilpres.Menurun.Dibandingkan.Pileg>
- Kompas.com. (2018, September 18). *Pemilu 2019, KPU Optimistis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai>
- Kompas.com. (2019, Mei 27). *KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>
- KPU Sumatera Barat. (2014, April 9). *Pemilu 2014*. Diambil kembali dari sumbar.kpu.go.id: <https://sumbar.kpu.go.id/page/read/47/pemilu-2014>
- KPU Sumatera Barat. (2019, April 17). *Pemilu 2019*. Diambil kembali dari sumbar.kpu.go.id: <https://sumbar.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-2019>
- Kuncoro, M. W. (2018). Media Sosial, Trust, dan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan Keluarga di Zaman Now*, 161-168.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3(2)*, 14-28.
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1-22.
- Olsson, S. A. (2014). *Corruption and Political Participation*. Swedia: Univesity of Gothenburg.
- Olsson, S. A. (2014). *Corruption and Political Participation*. Swedia: University of Gothenburg.
- Pulok, M. H., & Ahmed, M. U. (2017). Does Corruption Matter for Economic Development? Long Run Evidence From Bangladesh. *International Journal of Social Economics*, 350-361.
- Shapiro, R. W., & Winters, M. S. (2008). *Political Participation and Quality of Life*. Washington: Research Department Inter American World Bank.
- Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S.
- Solijonov, A. (2016). *Voter Turn-out Trend in The World*. Stockholm: International IDEA.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Surianto, P. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Tahun 2015*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suyatmiko, W., & Ratnaningtyas, S. (2017). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesisa 2017: Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Veenhoven, R. (1988). The Utility Of Happiness. *Social Indicator Research*, 333-354.
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Psikologi, Vol. 9(2)*, 94-99.
- Zheng, W.-w., Liu, L., Huang, Z.-w., & Tan, X.-y. (2016). Life Satisfaction as a Buffer of the Relationship Between Corruption Perception and Political Participation. *Social Indicator Research*, 1-17.